

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia penelitian dan akademik untuk merujuk pada tinjauan atau penelaahan terhadap berbagai sumber pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, laporan penelitian, serta sumber-sumber lain yang menyajikan teori-teori relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kajian pustaka adalah bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Dengan adanya kajian pustaka dapat membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami landasan teori serta arah pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, hasil penelitian seorang peneliti bukanlah satu inovasi yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang bertautan dengan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menyajikan penelitian terdahulu untuk membagikan gambaran atau garis depan pengetahuan yang mendasari penelitian dan untuk memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Kajian terdahulu adalah salah satu upaya dalam rangka mencari bandingan dalam suatu penelitian, dan dapat membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk menemukan inspirasi baru, walaupun lokasi dan masalahnya tidak sama persis

tetapi itu sangat membantu peneliti agar bisa menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam penelitian. Peneliti telah memilih tiga penelitian terdahulu yang dimana berkaitan dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak”. Berikut tabel yang menyajikan tentang penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Didit Waluyo, Fenti Prihtini Tui, Yakob Noho Nani (2025)	Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tolinggula	Efektivitas menurut Makmur (2010)	Kualitatif	Deskriptif	Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan
2.	Erlidha Catur Difayanti dan Isna Fitria Agustina (2025)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi dalam Mendukung Pembangunan Desa di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	Efektivitas menurut Siagian, (2001)	Kualitatif	Deskriptif	Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan
3.	Diana Nursa'ada, Toteng Suhara (2023)	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Studi Kasus Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat)	Efektivitas menurut Sutrisno (2007)	Kualitatif	Studi Kasus	Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

Sumber: Diolah peneliti dari penelitian terdahulu, 2026

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Didit Waluyo, Fenti Prihtini Tui, dan Yakob Noho Nani (2025) dengan judul “Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tolinggula”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa studi kasus di Kecamatan Tolinggula. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari segi ketepatan waktu, sudah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ketepatan sasaran sudah tepat sesuai sasaran. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam mengkaji efektivitas Program BLT Dana Desa dalam melakukan penelitian. Sementara itu, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas menurut Makmur sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Budiani sebagai pisau analisis penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan lokus penelitian, yaitu penelitian terdahulu dilaksanakan di Kecamatan Tolinggula sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erlihda Catur Difayanti dan Isna Fitria Agustina (2025) dengan judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi dalam Mendukung Pembangunan Desa di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran Program BLT Dana

Desa di Pemerintah Desa Sumorame dalam mendukung perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selain itu, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara umum penyaluran Program BLT-DD di Desa Sumorame tergolong cukup efektif. Ketepatan sasaran relatif tercapai meskipun terdapat keluarga miskin yang belum terakomodasi akibat keterbatasan kuota. Penyaluran berjalan sesuai jadwal, namun masih terkendala mekanisme pencairan dana di tingkat atas. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam mengkaji efektivitas Program BLT Dana Desa dalam penelitian. Sementara itu, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas menurut Siagian sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Budiani sebagai pisau analisis penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi penelitian, yaitu penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Diana Nursa'adah dan Toteng Suhara (2023) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Studi Kasus Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, mengidentifikasi hambatan yang

dihadapi, serta mengetahui kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Desa Cipatat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BLT Dana Desa di Desa Cipatat cukup efektif karena sebagian besar penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian, efektivitasnya belum maksimal karena adanya hambatan, seperti data penerima yang belum akurat, proses penggantian calon penerima manfaat yang memerlukan waktu, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam mengkaji efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Budiani sebagai pisau analisis penelitian. Selain itu, metode penelitian yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

2.3 Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia

artinya melayani atau memenuhi. Dengan demikian, administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses pelayanan atau pengaturan. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia karena manusia merupakan sumber adanya administrasi. Oleh karena itu, tujuan administrasi semata-mata untuk kepentingan manusia, karena keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang ingin hidup bermasyarakat.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi secara sempit menurut Atmosudirdjo dalam Sawir (2021:8) mengatakan bahwa: “Administrasi adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya.” Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi.

Administrasi dalam arti luas menurut Gie dalam Pasolong (2019:3) mengatakan bahwa: “Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.” Pandangan ini semakin diperkuat oleh pendapat administrasi dalam arti luas menurut Siagian dalam Pasolong (2019:3) mendefinisikan bahwa: “Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan administrasi sebagai proses kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih

secara terorganisir dan rasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi Publik terdiri dari kata administrasi dan publik. Administrasi yang berarti melayani, sedangkan publik mengandung arti umum, negara, dan masyarakat atau orang banyak. Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah hal baru, karena konsep tersebut sudah ada sejak dahulu, hanya saja para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2019:8) mengemukakan bahwa:

“Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang sumber daya manusia dan keuangan.”

Menurut Nigro dan Nigro dalam Rahman (2017:19) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut:

“Administrasi publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai peranan penting sehingga menjadi bagian dari proses politik, sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasolong dalam Malawat (2022:75) menyatakan bahwa “Administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang berkaitan dengan

pengelolaan urusan publik melalui kerja sama antarindividu atau lembaga dalam lingkungan pemerintahan, yang melibatkan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik.

2.4 Konsep Manajemen Publik

Kata manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur. Manajemen merupakan ilmu pengetahuan yang berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, manajemen berperan dalam mengkoordinasikan secara efektif serta efisien sumberdaya yang dimiliki dari suatu organisasi.

Definisi manajemen menurut Hasibuan dalam Mariane (2018:3) mengemukakan bahwa “Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Mariane (2018:2) menyatakan bahwa “manajemen ialah proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan dengan menggunakan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi manajemen menurut Terry dalam Mariane (2018:3) memberikan pendapatnya bahwa:

“Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen ialah suatu ilmu dan seni dalam mengelola berbagai sumber daya secara terencana, terorganisir, terarah, dan terkendali guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen tidak hanya berkaitan dengan proses kerja, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Manajemen publik merupakan bidang studi yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu mengenai elemen-elemen umum suatu organisasi. Ini melibatkan kombinasi fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian disatu sisi, dan sumber daya manusia, keuangan, informasi, serta faktor politik disisi lainnya. Selain itu, manajemen publik juga berhubungan dengan beragam aspek kehidupan yang kompleks.

Pasolong (2019:96) mengemukakan bahwa “Manajemen publik adalah manajemen instansi pemerintah.” Meskipun konsep semacam ini mengandung makna yang sangat umum, namun pada dasarnya esensinya tetap menyoroti upaya pengelolaan suatu instansi pemerintahan.

Manajemen Publik menurut Satibi dalam Andry dan Zulkifli (2023) mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Manajemen Publik ialah pengelolaan berbagai sektor publik yang dilakukan oleh institusi publik. Pengelolaan tersebut dapat berupa seluruh hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi hingga evaluasi penggunaan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, teknologi, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya (yang telah dipilih dan diarahkan) guna mencapai suatu tujuan tertentu.”

Berdasarkan pendapat diatas mencerminkan bahwa manajemen publik akan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks dan rumit. Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa manajemen publik tidak hanya berurusan dengan isu-isu kebijakan publik, politik, dan keuangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lainnya. Manajemen publik merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan proses administrasi publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, sumber daya, serta dana yang tersedia.

2.5 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang bermakna berhasil atau suatu tindakan yang dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer mengartikan efektivitas sebagai keakuratan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program. Disebut efektif apabila tercapainya tujuan maupun sasaran yang sesuai dengan harapan atau justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan

Menurut Siagian (2016:24) mendefinisikan pengertian efektivitas adalah sebagai berikut:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi efektivitasnya.”

Sedarmayanti dalam Fernandes dan Irawan (2025:52) mengemukakan pendapat bahwa:

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.”

Menurut Steers dalam Jumame (2018:92) mengemukakan pendapat terkait efektivitas bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”

Berdasarkan pemaparan teori dari para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat kesesuaian antara *output* suatu kegiatan, proses, atau tindakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang menjadi targetnya tercapai dengan baik, meskipun metode atau sumber daya yang digunakan dapat bervariasi. Di samping itu, penting untuk memahami perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menitikberatkan pada pencapaian hasil atau tujuan yang diharapkan, sedangkan efisiensi lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Makmur dalam Waluyo *et al.*, (2025:4) berpendapat terkait unsur-unsur efektivitas, antara lain sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Berdasarkan pemaparan diatas, menjelaskan bahwa efektivitas mempunyai beberapa unsur antara lain: ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Dengan demikian, efektivitas tercapai apabila unsur-unsur tersebut dapat diperhatikan.

Efektivitas suatu kegiatan atau program tidak muncul secara begitu saja. Di balik keberhasilan suatu upaya, terdapat serangkaian faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor efektivitas ini ibarat potongan puzzle yang apabila disusun dengan tepat, akan membentuk gambaran keseluruhan yang utuh dan bermakna.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Steers dalam Ridhwani (2021) sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas,
2. Struktur organisasi,
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Menurut Lubis dan Huseni (Ridhwani, 2021) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi yakni:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumberdaya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarnya. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan dalam suatu program dibutuhkan ukuran efektivitas untuk mengukur keberhasilan suatu program.

Menurut Campbell dalam Mutiarin dan Zaenudin (2021) diperlukan pengukuran efektivitas yang meliputi:

1. Keberhasilan Program.
2. Keberhasilan Sasaran.
3. Kepuasan Terhadap Program.
4. Tingkat *Input* dan *Output*.
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

Berdasarkan indikator pengukuran diatas dapat diartikan dalam keberhasilan program adanya suatu proses dalam suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan, selanjutnya dalam keberhasilan sasaran di ukur berdasarkan tingkat *input* maupun *output* yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian dalam kepuasan program mengacu pada kebutuhan pengguna dari kepuasan yang dirasakan terhadap kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan. Selain itu, dalam tingkat *Input* dan *Output* ditinjau dari seberapa besar perbandingan *Input* dan *Output* tersebut. Dan yang terakhir dalam pencapaian tujuan menyeluruh adanya penilaian umum terkait sejauh mana suatu organisasi melaksanakan tugasnya.

Pendapat lain, menurut Sutrisno (2018:125-126) mengemukakan bahwa

untuk mewujudkan suatu program yang efektif maka diperlukan pengukuran program dengan 5 (lima) indikator yang saling berkaitan yaitu:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas diatas dapat diartikan dalam pemahaman program di lihat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami program. Lalu dalam tepat sasaran di lihat dari bagaimana pemerintah merealisasikan program ini kepada masyarakat sebagai sasaran. Kemudian dalam tepat waktu di lihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selain itu, dalam tercapainya tujuan di lihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya. Dan yang terakhir dalam perubahan nyata di lihat sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Menurut Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017:3), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan karakteristik yaitu:

1. Ketepatan sasaran program, merujuk pada sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, merujuk pada kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program, merujuk pada sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan program, merujuk pada kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan karakteristik efektivitas di atas, dapat diartikan bahwa efektivitas program ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima, keberhasilan penyampaian informasi program, kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya pemantauan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan pemaparan menurut para ahli di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu program bisa dikatakan efektif jika dilihat berdasarkan rencana serta pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakat dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian, pada penelitian ini dalam pengukuran peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017:3), karena peneliti ingin mengetahui efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program.

2.6 Konsep Program

Kata program berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*programme*" yang mempunyai makna rencana atau acara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu. Program merupakan perencanaan yang disusun oleh individu atau kelompok untuk mencapai prinsip

yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dapat diinisiasi berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, kemudian diimplementasikan dalam suatu bentuk program.

Definisi program menurut Purwanto (2020:116) mengemukakan pendapat bahwa:

“Program adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarkan perencanaan yang bersumber dari data yang *valid* dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun. Capaian dan rencana yang dimaksud tentunya memiliki suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa program adalah hasil perencanaan yang berlandaskan data *valid* dan memadai. Program ini terdiri atas serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan program. Dengan demikian, perencanaan yang berkualitas dan berbasis data memainkan peran penting dalam menghasilkan program yang efektif serta selaras dengan tujuannya.

Menurut Santosa dalam Akbar (2022:2) mendefinisikan program kerja sebagai berikut:

“Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.”

Sedangkan menurut Adisaputro dalam Fernandes dan Irawan (2025:12) mendefinisikan program kerja sebagai berikut:

“Program kerja atau rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta sebagai keterangan mengenai

tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana diperuntukan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian.”

Berdasarkan pemaparan di atas, program kerja sebagai hasil dari proses perencanaan yang mendetail, mencakup berbagai elemen penting seperti jenis kegiatan, pelaksana, lokasi, jadwal, sumber daya yang akan digunakan, beserta tolak ukur untuk evaluasi hasil.

Berdasarkan pemaparan teori para ahli di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan data yang valid serta memadai, yang di dalamnya memuat serangkaian kegiatan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program mencakup berbagai elemen seperti jenis kegiatan, pelaksana, lokasi, sumber daya, dan tolak ukur evaluasi. Dengan adanya program kerja yang terstruktur, organisasi dapat menjalankan setiap kegiatan dengan terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.

2.7 Konsep Efektivitas Program

Efektivitas program menjadi kriteria untuk menilai sejauh mana sebuah program untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan sebelumnya. Hal tersebut dilihat dari usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Dalam efektivitas program, terdapat tingkat keberhasilan yang diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, apabila hasil dan tindakan yang dilakukan tidak tercapai, maka hal tersebut dapat dianggap dan dikatakan sebagai ketidakefektifan program.

Berdasarkan pemaparan diatas, menjelaskan bahwa efektivitas mempunyai beberapa unsur antara lain: ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan diatas, menjelaskan bahwa efektivitas mempunyai beberapa unsur antara lain: ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Dengan demikian, efektivitas tercapai apabila unsur-unsur tersebut dapat diperhatikan.

Efektivitas program menurut Rini dan Indah dalam Pradipta dan Hariani (2017) menyatakan bahwa “Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Berdasarkan definisi tersebut, menjelaskan bahwa efektivitas program adalah suatu metode untuk menilai sejauh apa tingkat kesesuaian program dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, efektivitas program diukur berdasarkan tingkat kesesuaian antara apa yang direncanakan (tujuan) dan hasil yang diperoleh oleh program tersebut.

Menurut Ditjen Binlantas Depnaker dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017:14) menyatakan bahwa:

“Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, menjelaskan bahwa efektivitas suatu program diukur dengan mengevaluasi sejauh mana tujuannya telah tercapai, yang

dilakukan dengan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dihasilkan program tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas suatu program bergantung pada sejauh mana keselarasan antara tujuan dan *output* yang dicapai.

2.8 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

1). Pengertian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT Dana Desa merupakan program bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai yang bersumber dari dana desa. Bantuan ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya keluarga miskin atau kurang mampu yang berdomisili di desa dan tidak menerima bantuan dari program sosial lainnya. Program BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tujuan dari Program BLT Dana Desa sendiri adalah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan membantu masyarakat miskin dalam meringankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Rizaldi, *et al.*, 2025).

Dana Desa sendiri diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, yang menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Indika, *et al.*, 2022). Pemerintah menetapkan besaran nominal alokasi dana bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Bantuan ini dapat disalurkan secara 1 (satu) bulan atau per 3 (tiga) bulan dan disalurkan selama 12 (dua belas) bulan. Skema tersebut disesuaikan dengan kebijakan masing masing desa dan kondisi administrasi keuangan desa.

2). Kriteria Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat di tingkat desa, dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025. Berdasarkan regulasi tersebut, calon penerima diprioritaskan sebagai keluarga miskin dan rentan yang terdata dalam desil 1 hingga desil 4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kriteria penerima adalah sebagai berikut:

1. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun, riwayat penyakit kronis dan penyandang disabilitas;
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin;
4. Belum tersentuh bantuan sosial lain, seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);

Selanjutnya, daftar calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes), kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut selanjutnya dilaporkan kepada bupati melalui camat.

3). Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Margajaya dilaksanakan secara nontunai melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam proses ini, setiap Rukun Tetangga (RT) mengusulkan calon KPM berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya. Usulan tersebut kemudian dimusyawarahkan di tingkat Rukun Warga (RW) dan selanjutnya dibawa ke forum Musyawarah Desa (Musdes) bersama pemerintah desa serta perangkat dusun untuk dibahas dan ditetapkan. KPM yang telah ditetapkan diwajibkan menyerahkan nomor rekening bank pribadi kepada pemerintah desa sebagai syarat administrasi penyaluran bantuan. Tahap kedua adalah proses penyaluran bantuan yang dilaksanakan secara nontunai. Penyaluran dilakukan oleh kaur keuangan desa dan disahkan melalui tanda tangan (TTD) oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKADS). Selanjutnya, dana Bantuan Langsung Tunai ditransfer ke rekening masing-masing KPM melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). KPM dapat mengambil bantuan tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun layanan *BRILink* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah desa, dengan nominal bantuan yang telah ditetapkan.

2.9 Kerangka Berpikir

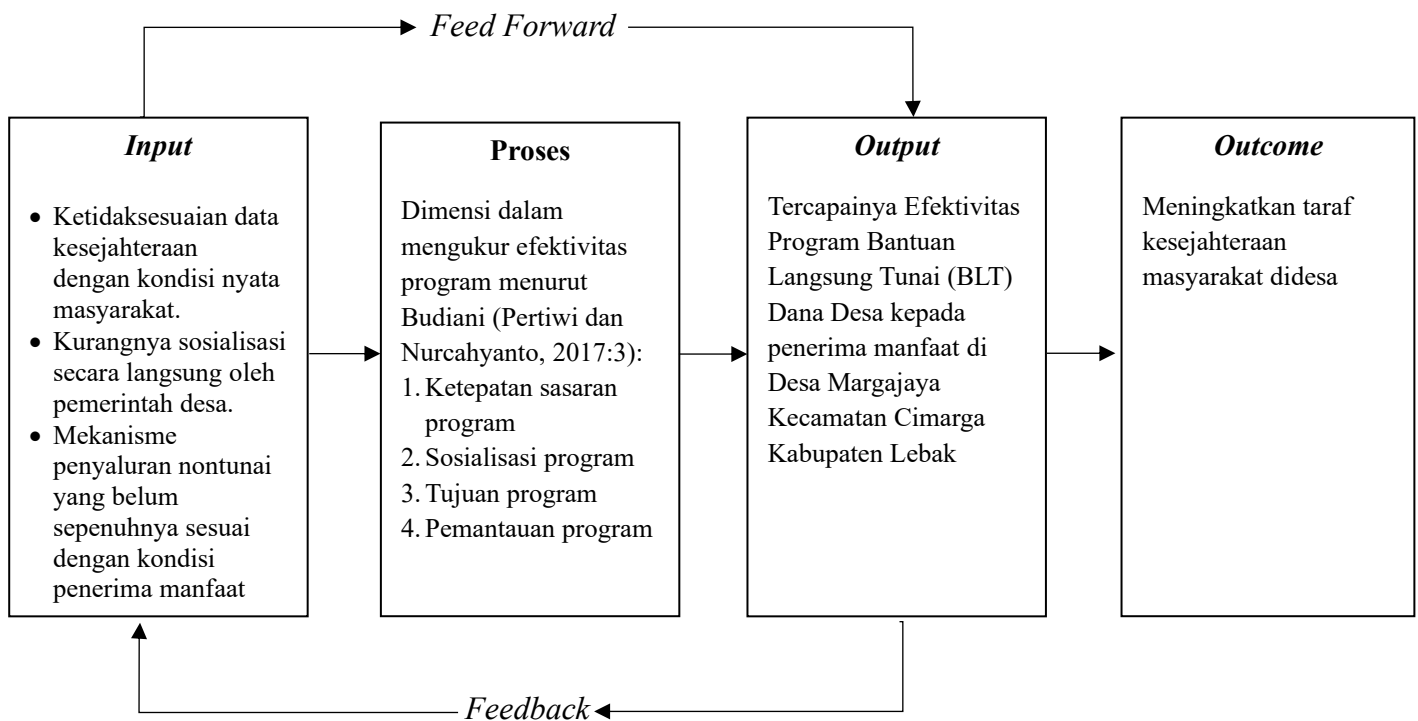
Kerangka pemikiran atau berpikir merupakan kerangka untuk menggambarkan alur pikir yang logis (*logical construct*). Dengan kata lain, kerangka berpikir ini disusun untuk menjawab secara rasional atas masalah yang telah dirumuskan. Oleh

karena itu, pada bagian kerangka berpikir ini harus merefleksikan hubungan antar variabel yang diteliti (Satibi, 2017:105). Pada kerangka berpikir ini, diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk memahami alur pikiran peneliti. Efektivitas pada suatu program menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk diteliti. Karena pada saat ini banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan berbagai kebijakan lalu diimplementasikan ke dalam bentuk suatu program akan tetapi pada pelaksanaannya belum tentu berjalan dengan efektif.

Deskripsi mengenai kerangka untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Efektivitas disini sebagai tolak ukur bagaimana program tersebut pada pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Maka oleh karena itu, Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017:3) menyatakan bahwa untuk mengetahui efektivitas bisa dilakukan dengan memakai 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, merujuk pada sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebuah program dibuat harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, dikatakan tepat sasaran jika program dan kebutuhan masyarakat selaras.
2. Sosialisasi program, merujuk pada kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program, merujuk pada sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, merujuk pada kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Agar kerangka berpikir diatas dapat lebih jelas dan lebih mudah untuk di pahami, peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir tersebut ke dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

2.10 Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah peneliti gambarkan di atas, maka dengan demikian peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut:

- 1). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak dapat berjalan efektif apabila dalam pelaksanaannya memperhatikan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program.
- 2). Terdapat faktor penghambat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak yaitu ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi nyata masyarakat, kurangnya sosialisasi secara langsung, serta mekanisme penyaluran nontunai yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 3). Terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.